

ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN (STUDI DI KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA)KOTA PEKANBARU

Oleh

Dian Putriani dan Parjiyana

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

In terms of implementation, the levy charged cleanliness, then the implementation needs to be evaluated to measure the performance of the running. In connection with the issue, then formulated the problem this research is how the implementation of the levy charged for cleanliness in the village of Simpang Tiga subdistrict Bukit Raya Pekanbaru? With the aim of this study to determine the results of voting conducted levy charged hygiene officer (RW), (RT) and to determine the sanction given to the people who shall levy hygiene violate local regulation No.10 of 2012. In this study the data and information collected using a questionnaire. This research can be categorized as a descriptive research with quantitative methods. The research site is in the village of Simpang Tiga subdistrict Bukit Raya Pekanbaru city, with a population of this research is the Head of Bukit Raya, Head. Kep, Works and Supplies, Treasurer Reception, Head Simpang Tiga, Head of Development, Officer Levy Cleanliness collector (RW), the Neighborhood (RT) by using purposive sampling technique and levy payers using simple random sampling technique. Types of data collected included primary data and secondary data. For primary data derived from responses through interviews, questionnaires, observation and documentation. For secondary data through a department that deals with Local Regulation No.10 of 2012. In the analysis of the data, after the data is collected the next step will be clarified and explained by the type and form of data then descriptively. As for the results of the study authors to the conclusion that the implementation of the levy charged for cleanliness in the village of Simpang Tiga subdistrict Bukit Raya Pekanbaru well served seen from the implementation of the levy charged for cleanliness by the clerk to the community has been well served by good although there are still some obstacles, such as sufficient number of people who do not want pay the levy hygiene and of the government itself is still less responsive in taking action against this is because the government is less strict in giving a legal basis to the relevant agencies, and according to the author is expected from the government to carry out this regulation as well as possible for the future in order to realize development and prosperity through a levy hygiene.

Keywords : Implementation, charged cleanliness

ABSTRAK

Dalam hal pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan, maka dalam pelaksanaannya perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja yang berjalan. Sehubungan dengan masalah tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru? Dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil pemungutan yang dilakukan petugas pemungutan retribusi kebersihan (RW), (RT) dan untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang wajib retribusi kebersihan yang melanggar Peraturan daerah No.10 Tahun 2012. Dalam penelitian ini data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan angket. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Adapun lokasi penelitian ini di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan populasi penelitian ini adalah Camat Bukit Raya, Kasubag. Kep, Umum, dan Perlengkapan, Bendahara Penerimaan, Lurah Simpang Tiga, Kasi Pembangunan, Petugas pemungut Retribusi Kebersihan (RW), Rukun Tetangga (RT) dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan masyarakat wajib retribusi menggunakan teknik Simple Random Sampling. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data skunder. Untuk data primer berasal dari respon melalui wawancara, quisioner, observasi maupun dokumentasi. Untuk data skunder melalui instansi yang berkaitan dengan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012. Dalam analisis data, setelah data terkumpul langkah selanjutnya akan diklarifikasikan lalu dijelaskan menurut jenis dan bentuk data, selanjutnya dilakukan diskriptif. Adapun dalam hasil penelitian penulis mendapat kesimpulan bahwa

pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru CUKUP TERLAKSANA dilihat dari pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan oleh petugas kepada masyarakat sudah cukup terlaksana dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti cukup banyaknya masyarakat yang tidak mau membayar retribusi kebersihan dan dari pihak pemerintah sendiri masih kurang tanggap dalam menindak hal ini dikarenakan pemerintah kurang tegas dalam memberikan landasan hukum kepada dinas terkait, dan menurut penulis diharapkan dari pihak pemerintah untuk menjalankan peraturan ini dengan sebaik-baiknya untuk kedepannya agar terwujud pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui retribusi kebersihan ini.

Key Words : Implementasi, Retribusi Kebersihan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya.

Dalam upaya mengoptimalkan pembayaran retribusi kebersihan inilah pemerintah Kota Pekanbaru melalui DPRD Kota Pekanbaru Telah mengeluarkan PERDA Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Untuk menjalankan Undang-Undang

ini tentunya diperlukan keterlibatan pemerintahan dibawahnya yaitu Dinas Kebersihan dan Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan yang ada dikota Pekanbaru. Pengelolaan Kebersihan ini menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru, Namun Penanggung jawab penagihan dan Pemungutan Retribusi Kebersihan diberikan wewenang kepada pihak Kecamatan dan Pihak Kelurahan.

Di Kota Pekanbaru yang melakukan pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan untuk lingkungan bangunan dan usaha dilakukan oleh kecamatan, dan pemerintah kota pekanbaru telah memberikan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi kepada kecamatan, hal ini didukung oleh surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat. Dalam hal ini berarti bahwa kecamatan memang berperan penting dalam rangka kebersihan untuk jenis lingkungan bangunan hunian dan Usaha

Tabel 1 : Ketentuan Retribusi Kebersihan untuk Bangunan Hunian dan Usaha

NO	WAJIB RETRIBUSI	SUMBER SAMPAH	RETRIBUSI KEBERSIHAN	
1	Pemilik / penguasa rumah dan sejenisnya	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian: a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3	Rp. 10.000 Rp. 7.000 Rp. 5.000	
2	Pemilik/ penguasa kantor dan sejenisnya	Gedung kantor dan sejenisnya milik pemerintah maupun milik swasta Gedung kantor kelas 1 Gedung kantor kelas 2 Gedung kantor kelas 3	Rp. 210.000 Rp. 150.000 Rp. 60.000	
3	Gedung perkantoran dan sejenisnya	Komplek perkantoran milik pemerintah maupun milik swasta	Rp. 300.000	
4	Pemilik/ penguasa gudang dan sejenisnya	Gudang gudang kelas 1 Gudang gudang kelas 2 Gudang gudang kelas 3	Rp. 150.000 Rp. 120.000 Rp. 100.000	
5	Pemilik/ penguasa tempat Hiburan dan sejenisnya	Gedung/tempat karaoke Diskotik, Bioskop	Rp. 250.000	
6	Pimpinan Hotel dan sejenisnya	Komplek/Bangunan perhotelan : - Bintang empat keatas - Bintang tiga - Bintang dua - Bintang Satu - Melati	Kotegori I penyediaan TPA	Kategori II Sumber ke TPA
			Rp. 600.000	Rp.4.500.000
			Rp. 500.000	Rp.4.000.000
			Rp. 400.000	Rp.3.000.000
			Rp. 300.000	Rp.2.500.000
Rp. 200.000	Rp.1.500.000			
7	Pimpinan penginapan,wisma, dan sejenisnya	Komplek/bangunan Pennginapan, wisma atau sejenisnya: - kelas 1 - kelas 2 - kelas 3	Rp. 180.000 Rp. 150.000 Rp. 120.000	
8	Pimpinan usaha perbengkelan dan sejenisny	Bangunan Perbengkelan -Bengkel Mobil -Bengkel SepedaMotor	Rp. 200.000 Rp. 100.000	
9	Pemilik/Pengusaha Rumah Tangga dan sejenisnya	Bangunan Usaha Rumah Tangga roti, mie, tahu, dan tempe atau sejenisnya	Rp. 90.000	
10	Pemilik/Pengusaha Usaha Penggajian dan sejenisnya	Tempat Usaha Penggajian atau sejenisnya	Rp. 100.000	
11	Pemilik/pengusaha Perabot dan sejenisnya	Tempat Usaha Perabot	Rp. 100.000	
12	Pemilik/Pedagang kayu dan sejenisnya	Tempat Usaha penjualan kayu atau sejenisnya	Rp. 100.000	
13	Pimpinan Usaha rumah makan dan sejenisnya	Komplek/Bangunan Rumah makan dan Restoran atau sejenisnya - kelas 1 - kelas 2 - kelas 3	Rp. 750.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000	
14	Pemilik/Pimpinan Apotek dan Toko obat dan sejenisnya	Tempat Usaha obat-obatan - Apotek - Toko obat /depot obat	Rp. 60.000 Rp. 30.000	

15	Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dan sejenisnya	Tempat Usaha atau Showroom atau sejenisnya - kelas 1 - kelas 2	Rp. 300.000 Rp. 150.000	
16	Pimpinan Rumah Sakit , rumah bersalin, klinik, praktek Dokter dan sejenisnya	Komplek/ Bangunan Rumah sakit atau sejenisnya - Besar - Sedang - Kecil	Rp. 6.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 3.000.000	
17	Pemilik/Pengusaha Wartel atau Warnet dan sejenisnya	Tempat Usaha Wartel/Warnet sejenisnya: -Besar -Kecil	Rp. 30.000 Rp. 18.000	
18	Pompa Bensin (SPBU) dan sejenisnya	Tempat Usaha Pompa Bensin SPBU atau sejenisnya: - kelas 1 - kelas 2 - kelas 3	Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	
19	Pangkalan Bongkar Muat barang atau sejenisnya	Tempat bongkar muat barang atau sejenisnya	Rp. 100.000	
20	Pemilik/pengusaha Toserba/mini market dan Swalayan dan sejenisnya	Bangunan Usaha Mini market toserba atau sejenisnya: -kelas 1 -kelas 2	Rp. 250.000 Rp. 150.000	
21	Pengusaha/pengelola Supermarket /mall Plaza dan sejenisnya	Bangunan Super Market, Mall Plaza atau shopping center	Kategori I Penyediaan TPA	Kategori II Sumber ke TPA
			Rp. 6.000.000	Rp.1.000.000
22	Pemilik/pengusaha Salon /Barber shop dan sejenisnya	Tempat Usaha Salon / barber shop: Kelas 1 (Ruko) Kelas 2 (Kedai)	Rp. 90.000 Rp. 60.000	
23	Pemilik Butik/ Distro dan Sejenisnya	Tempat Usaha Butik/ Distro dan sejenisnya	Rp. 50.000	
24	Pemilik/ Pengusaha Konveksi dan Sejenisnya	Tempat Usaha Konveksi / tukang jahit baju dan sejenis: Kelas 1 (Ruko) Kelas 2 (Kedai)	Rp. 60.000 Rp. 30.000	

Sumber : Peraturan Daerah No.10 Lembaran Nomor 7 Tahun 2012

Berdasarkan keterangan jenis bangunan rumah hunian dan usaha diatas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah, bahwa banyak sumber retribusi kebersihan yang mampu digali untuk meningkatkan penerimaan PAD Kota Pekanbaru terutama yang merupakan objek pemungutan retribusi kebersihan jenis

bangunan rumah hunian dan usaha disetiap kelurahan. Sebab kriteria yang wajib bayar retribusi kebersihan sudah sangat jelas dan jumlahnya cukup banyak juga. Oleh karena itu pihak kelurahan diharapkan mampu melakukan pemungutan retribusi kebersihan yang sudah ditugaskan

untuk dapat menambah PAD Kota Pekanbaru.

Tabel 2 : Jenis Bangunan Rumah Hunian dan Usaha Yang Wajib Retribusi Kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Jenis Bangunan Rumah Hunian dan Usaha Wajib Retribusi Kebersihan	Jumlah	Biaya Retribusi	Potensi
1.	Rumah Tangga			
	a. Kelas 1	3400	10.000	34.000.000
	b. Kelas 2	5600	7000	39.200.000
	c. Kelas 3	10.700	5000	53.500.000
2.	Gedung Kantor Milik Pemerintah	3	300.000	900.000
3.	Bangunan Perbengkelan	13	100.000	130.000
4.	Bangunan Perusahaan roti & tempe	3	90.000	270.000
5.	Pengusaha Perabot	8	100.000	800.000
6.	Bagunan Pengergajian Kayu	5	100.000	500.000
7.	Rumah Makan/restoran			
	a. Kelas 1	7	750.000	5.250.000
	b. Kelas 2	10	500.000	5.000.000
	c. Kelas 3	34	300.000	10.200.000
8.	Apotik	25	60.000	1.500.000
9.	Dealer dan Servise	3	150.000	450.000
10.	Rumah sakit, klinik bersalin,dan praktek dokter	11	3.000.000	33.000.000
11.	Pom Bensin (SPBU)	3	250.000	750.000
12.	Pengusaha Wartel atau Warnet	25	18.000	450.000
13.	Toserba atau mini market	18	150.000	2.700.000
14.	Salon	17	60.000	1.020.000
	Jumlah	19.869		189.620.000

Sumber: Kantor Kelurahan Simpang Tiga, 2015

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jenis bangunan rumah hunian dan usaha yang wajib membayar retribusi kebersihan cukup banyak, dimana yang terbesar berasal dari

rumah tangga klas C yaitu berjumlah 10.700. Kemudian jenis usaha yang paling banyak adalah rumah makan kelas 3 yang berjumlah 34 buah

Tabel 3 : Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan di lingkungan Kelurahan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Periode Tahun 2015

No	Kelurahan	Periode Tahun 2015		Potensi
		Target	Realisasi	
1.	Simpang Tiga	80.000.000	45.550.000	189.620.000
2.	Tangkerang Selatan	75.000.000	25.500.000	-
3.	Tangkerang Utara	50.000.000	31.540.000	-
4.	Tangkerang Labuai	50.000.000	20.150.000	-

Sumber : Kantor Camat Bukit Raya, 2015

Dimana seharusnya potensi yang dapat diperoleh dari pemungutan retribusi kebersihan di lingkungan Kelurahan Simpang Tiga ini mencapai 189.620.000, tetapi pada kenyataannya Realisasi penerimaan uang Retribusi Kebersihan masih jauh dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 45.550.000 dari target yang seharusnya sebesar 80.000.000

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas dapat ditarik fenomena masalah sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya realisasi penerimaan Retribusi Kebersihan dari target yang telah ditentukan, sehingga realisasi penerimaan retribusi ini tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan, padahal kelurahan Simpang Tiga dapat berpotensi besar dalam memberikan sumbangan terhadap PAD dalam pemungutan Retribusi Kebersihan.
2. Pengenaan sanksi wajib retribusi tidak diterapkan sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi kebersihan, sehingga masih banyaknya masyarakat yang mengulur-ulur waktu dalam pembayaran uang retribusi Kebersihan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui sanksi yang mereka dapat jika tidak membayar uang Retribusi Kebersihan.
3. Pemungutan uang Retribusi Kebersihan yang dilakukan pada jenis bangunan rumah hunian tidak sesuai dengan aturan Perda No.10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Kebersihan, yang menyatakan biaya retribusi untuk rumah hunian sekitar Rp.10.000 untuk rumah hunian kelas 1, Rp.7000 untuk rumah hunian kelas 2, dan Rp.5000 untuk rumah hunian kelas 3, tetapi pada kenyataannya pungutan uang

retribusi tersebut dipungut diatas Rp.10.000 , hal tersebut melebihi dari pungutan untuk rumah hunian kelas 1.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemungutan Retribusi Kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintahan Kota Pekanbaru, Khususnya Kecamatan Bukit Raya dalam memungut retribusi kebersihan jenis bangunan rumah hunian dan usaha di Kota Pekanbaru.
3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bahu ilmu Administrasi Negara tentang kebijakan.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Menurut Dunsire (Dalam Kusdi 2011:7) asal kata administrasi adalah bahasa batin, administrate, yaitu gabungan ad (to)+ ministrare (serve). Kata ini selanjutnya membentuk kata administrotio yang berarti cara membantu atau member bantuan.

Menurut Syafri (2012:3) Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin ad dan ministrare, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta administration yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan, pengelolaan”.

Menurut Siagian (2006:14) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Konsep Manajemen

Manajemen Menurut Gibson, Donnelly & Inancevich (dalam Ratminto & Atik, 2009:2) adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktifitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak biasa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.

Manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang lain yang menduduki jabatan manajerial atau memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain senada dengan yang diungkapkan Siagian (2002:2) bahwa dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Terry (dalam Zulkifli, 2009:48) Fungsi-fungsi Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari:

1. Perencanaan (*Plainning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Pelaksanaan/penggerak (*Actuanteing*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Konsep Pelaksanaan

Siagian (2002:126) Menyatakan pelaksanaan tugas adalah kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan

tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Amstrong, Michael (dalam Denur 2005:2) Menyatakan bahwa pelaksanaan tugas tersebut ialah usaha dalam mendapatkan hasil yang optimal, sebagaimana yang diharapkan serta memerlukan kualitas sumber daya manusia (pimpinan dan karyawan) yang dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Terry (2001:23) Pelaksanaan merupakan usaha penggerakan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran

Konsep Kebijakan Publik

Duun (2003:22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis.

Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri, dan aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan), alternative dalam arah yang dikehendaki (dalam tangkilisan, 2003:6).

Sementara itu menurut Suharto (2005:7) Kebijakan adalah suatu ketepatan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Titmuss (1974,dalam Ali,2015:5) adalah sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-Oriented) dan berorientasi pada tindakan **Operasional Variabel**

(action-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu

Tabel 4 : Operasional Variabel Penelitian Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
Kebijakan adalah Suatu ketepatan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.(Suharto 2005;7)	Pelaksanaan pemungutan Retribusi Kebersihan Khususnya di kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	1. Efektivitas	a. Peraturan pemungutan retribusi b. Peran Serta masyarakat dalam pembiayaan retribusi kebersihan c. Adanya informasi yang jelas d. Adanya upaya sosialisasi	Terlaksana Cukup Terlaksan Kurang Terlaksana
		2. Kecukupan	a. Kelancaran Pemungutan Retribusi kebersihan b. Tidak memungut biaya tambahan c. Pmbayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku d. Besar biaya retribusi sangat jelas	
		3. Perataan	a. Tercapainya keadilan dalam penetapan biaya retribusi kebersihan b. Menerapkan kedisiplinan	
			c. Keadilan dan keterbukaan petugas pemungutan retribusi d. Adanya pelayanan yang merata kepada masyarakat yang berbeda	Terlaksana Cukup Terlaksan Kurang Terlaksana

		4. Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepuasan masyarakat b. Menampung usulan masyarakat c. Keluhan masyarakat d. Bisa diterima masyarakat 	
		5. Ketepatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsistensi prosedur b. Adanya waktu penagihan c. Karcis resmi d. Waktu penyeteroran 	

Sumber: Modifikasi Peneliti 2015

Teknik Pengukuran

Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $> 66\%$.
seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $< 35\%$

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian cukup terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $36-65\%$.

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian kurang terlaksana dengan baik dan total skor dari

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbentuk Deskriptif artinya, peneliti menggambarkan secara keseluruhan tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan menggunakan analisis kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Populasi dan Sampel

Tabel 5 : Jenis Populasi dan Sampel di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Camat Bukit Raya	1	1	100%
2.	Kasubag. Kep, Umum dan Perlengkapan	1	1	100%
3.	Bendahara Penerimaan	1	1	100%
4.	Lurah Simpang Tiga	1	1	100%
5.	Kasi Pembangunan	1	1	100%
6.	Petugas Pemungut Kebersihan (RW)	18	9	50%
7.	Rukun Tetangga (RT)	90	9	10%
8.	Kepala Keluarga (KK)	20.199	50	0,25%
9.	Rumah Makan/restoran	51	10	19,6%
Jumlah		20.363	83	0,40%

Sumber : Data Olahan Lapangan Di Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Simpang Tiga Tahun 2016.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Adapun yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Tanggapan rerponden terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi kebersihan yang telah dilaksanakan.
- Data tentang responden yang terdiri dari pendidikan, umur dan lain-lain yang dianggap perlu.

2. Data Sekunder,yakni:

Data Sekunder adalah data yang sudah baku atau data yang diperoleh dari dokumentasi atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek penelitian.

- Keadaan geografis dan domografis Kota Pekanbaru Khususnya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Sarana dan prasarana di Kantor Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Literatur-literatur, perundang-undangan yang sedang berlaku serta informasi-informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner (Angket)

Yaitu peneliti membuat datar pertanyaan yang telah disusun secara

sistematis berkaitan dengan variable penelitian dan kemudian disebarkan kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

2. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan mendapatkan data-data yang empirik, yang tampak (kasat mata) terhadap objek yang diteliti guna pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti, sehingga peneliti dapat melihat pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan tersebut.

3. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Peneliti melakukan dialog dan memberikan pertanyaan kepada responden untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan keberhasilan suatu pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau lembaga yang relevan mengenai Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan.

PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan (Studi Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru

Retribusi merupakan suatu diantara cara yang terbaik dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu juga retribusi merupakan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan jelas mengatakan dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepada daerah perlu diberikan kepada daerah bukannya ikannya tetapi pancingnya. Hal ini mengidentifikasi bahwa, daerah perlu menggali dan mencari serta membudayakan seluruh potensi-potensi yang ada didaerah baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan termasuk didalamnya retribusi besar kecilnya retribusi tergantung membudayakan sector-sektor retribusi.

1. Efektivitas

Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah tentunya diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan dan kemajuan yang diinginkan. Oleh karena itu, efektivitas suatu kebijakan sangat penting diperhatikan pada tahap perencanaan kebijakan tersebut. Efektivitas suatu kebijakan adalah bermakna bahwa apakah hasil atau dampak yang diinginkan dari suatu kebijakan telah tercapai sesuai dengan direncanakan. Semakin tinggi suatu kebijakan, maka semakin berhasil pula pebcapaian target yang diinginkan.

Tabel 6 : Evaluasi Tanggapan responden Pada Pegawai dan Petugas Pemungut Retribusi Kebersihan Terhadap Indikator Efektivitas Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga.

No.	Item yang di Nilai	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Peraturan pemungutan retribusi kebersihan	16 (69,57%)	7 (30,43%)	-	23
2.	Peran serta masyarakat dalam pembiayaan retribusi kebersihan	8 (34,78%)	15 (65,22%)	-	23
3.	Adanya Informasi yang jelas	16 (61,53%)	7 (30,43%)	-	23
4.	Adanya upaya sosialisasi	8 (34,78%)	3 (13,04%)	12 (52,17%)	23
Jumlah		48	32	12	92
Rata-rata		12	8	3	23
Persentase (%)		52,17%	34,79%	13,04%	100 %

Sumber : Data Hasil Survei 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dikategorikan kurang terlaksana dengan persentase sebesar 13,04% dari keseluruhan tanggapan atau jawaban responden pegawai dan petugas yang berjumlah 23 orang. Adapun penilaian yang dikategorikan kurang terlaksana yaitu $\leq 35\%$.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tentang pemungutan retribusi kebersihan ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena masih banyaknya masyarakat yang

tidak mau membayar retribusi kebersihan, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang diterangkan bahwa masyarakat yang memiliki bangunan, tanah, lapangan atau yang merupakan sumber sampah dikenakan retribusi kebersihan, dan terutama masyarakat yang memiliki rumah hunian dan usaha rumah makan yang banyak menghasilkan sumber sampah. Sehingga dari pihak Lurah hendaknya melakukan tindakan yang tegas kepada masyarakat yang tidak mau membayar retribusi kebersihan, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Tabel 7 : Evaluasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Eektivitas Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga.

No.	Item yang di Nilai	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Peraturan pemungutan retribusi kebersihan	29 (48,33%)	31 (51,67%)	-	60
2.	Peran serta masyarakat dalam pembiayaan retribusi kebersihan	26 (43,33%)	23 (38,33%)	11 (18,33%)	60
3.	Adanya Informasi yang jelas	37 (61,67%)	19 (31,67%)	4 (6,67%)	60
4.	Adanya upaya sosialisasi	12 (20%)	22 (36,67%)	26 (43,33%)	60
Jumlah		104	95	41	240
Rata-rata		26	23,75	10,25	60
Persentase (%)		43,33%	39,58%	17,09%	100%

Sumber : Data Hasil Survei 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan dikategorikan cukup terlaksana dengan persentase 39,58% dari keseluruhan tanggapan atau responden masyarakat wajib retribusi yang berjumlah 60 orang. Adapun penilaian yang dikategorikan cukup terlaksana yaitu 36-65%.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat menerima peraturan pemerintah daerah tentang retribusi

2. Kecukupan

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan pemerintah, maka salah satu criteria penting dari kebijakan tersebut yang perlu dinilai adalah sejauh mana kebijakan tersebut telah berperan telah memecahkan permasalahan yang ada, baik yang terdapat dibidang sosial, politik, dan lain sebagainya yang

kebersihan dan cukup dapat berjalan secara efektif, akan tetapi masi banyak juga masyarakat yang tidak mau membayar retribusi kebersihan dikarenakan kurang tegas dari petugas pemungut retribusi dan kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat, dan sangat diharapkan dari pihak keluraan dapat memberikan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, dan dapat mengurangi angka masyarakat yang tidak mau membayar retribusi kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga.

berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini yang dievaluasi adalah criteria kecukupan dari pada kebijakan yang diterapkan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai oleh kebijakan dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pemungutan Retribusi dan dalam upaya pencapaian target PAD setempat.

Tabel 8 : Evaluasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Indikator Kecukupan Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga.

No.	Item yang di Nilai	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Kelancaran Pemungutan Retribusi Kebersihan	5 (21,73%)	8 (34,78%)	10 (43,48%)	23
2.	Tidak Memungut Biaya Tambahan	5 (21,73%)	8 (34,78%)	10 (43,48%)	23
3.	Pembayaran Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	6 (26,08%)	8 (34,78%)	9 (39,13%)	23
4.	Besar Biaya Retribusi sangat jelas	13 (56,52%)	10 (43,48%)	-	23
Jumlah		29	34	29	92
Rata-rata		7,25	8,5	7,25	23
Persentase (%)		31,52%	36,96%	31,52%	100%

Sumber : Data Hasil Survei 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan dikategorikan cukup terlaksana dengan persentase 36,96% dari keseluruhan tanggapan atau responden petugas atau pegawai yang berjumlah 23 orang. Adapun penilaian yang dikategorikan cukup terlaksana yaitu 36-65%.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa petugas pemungut retribusi kebersihan belum bisa menjalankan kebijakan yang

ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru tentang retribusi kebersihan untuk penetapan biaya retribusi kebersihan, karena petugas memungut biaya tambahan untuk keperluan RT dan untuk kepentingan masyarakat juga, karena truk sampah dari pemerintah banyak yang tidak sampai ke daerah mereka untuk mengangkut sampah sehingga dengan terpaksa petugas meminta sumbangan tambahan untuk biaya retribusi kebersihan.

Tabel 9 : Evaluasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Kecukupan Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga.

No.	Item yang di Nilai	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Kelancaran Pemungutan Retribusi Kebersihan	20 (33,33%)	22 (36,67%)	18 (30%)	60
2.	Tidak Memungut Biaya Tambahan	17 (28,33%)	25 (41,67%)	18 (30%)	60
3.	Pembayaran Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	16 (26,67%)	27 (45%)	17 (28,33%)	60

4.	Besar Biaya Retribusi sangat jelas	22 (36,67%)	28 (46,67%)	10 (16,67%)	60
Jumlah		75	102	63	240
Rata-rata		18,75	25,5	15,75	60
Persentase (%)		31,25%	42,5%	26,25%	100%

Sumber : Data Hasil Survei 2016

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indicator kecukupan dikategorikan cukup terlaksana dengan persentase 42,5% dari keseluruhan tanggapan responden masyarakat wajib retribusi yang berjumlah 60 orang. Adapun penilaian yang dikategorikan cukup terlaksana adalah 36-65%.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa petugas cukup lancar dalam memungut retribusi kebersihan, akan tetapi masih kurang jelas dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat

kurang tau biaya yang dipungut apakah termasuk biaya tambahan didalamnya.

3. Perataan

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan yang diterapkan juga perlu menilainya dari segi pemerataan. Pemerataan yang dikasud dalam hal ini apakah biaya dan manfaat dari kebijakan didistribusikan merata sesuai dengan kelompok masyarakat yang berbeda. Jadi, kebijakan yang disusun dan diterapkan harus mampu memberikan manfaat yang merata sesuai dengan kelompok dan golongan masyarakat.

Tabel 10 :Evaluasi Tanggapan Responden Pegawai dan Petugas Pemungutan Retribusi Kebersihan Terhadap Indikator Perataan Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga.

No.	Item yang di Nilai	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Tercapainya Keadilan Dalam Penetapan Biaya Retribusi Kebersihan	21 (91,30%)	2 (8,70%)	-	23
2.	Menerapkan Kedisiplinan	3 (13,04%)	9 (39,13%)	11 (47,82%)	23
3.	Keadilan dan Keterbukaan Petugas Pemungutan Retribusi	12 (52,17%)	11 (47,82%)	-	23
4.	Adanya pelayanan yang merata kepada masyarakat yang berbeda.	9 (39,13%)	14 (60,87%)	-	23
Jumlah		45	36	11	92
Rata-rata		11,25	9	2,75	23
Persentase (%)		48,91%	39,13%	11,96%	100%

Sumber : Data Hasil Survei 2016

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator pemerataan dikategorikan cukup terlaksana dengan

persentase 39,13% dari keseluruhan tanggapan responden pegawai dan petugas pemungut retribusi yang

berjumlah 23 orang. Adapun penilaian yang dikategorikan cukup terlaksana adalah 36-65%.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa petugas cukup melaksanakan tugasnya dengan tidak membeda-bedakan dalam memungut retribusi dan dipungut secara adil berdasarkan jenis bangunan dan kelas

yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi untuk kedisiplinan masih kurang dilaksanakan oleh petugas karena banyaknya masyarakat yang tidak membayar retribusi kebersihan, petugas hanya dapat memberikan sanksi seperti tidak memungut sampah mereka dan tidak memberikan pelayanan untuk segala pengurusan baik di RT, RT, maupun di kelurahan.

Tabel 11 :Evaluasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Perataan Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga.

No.	Item yang di Nilai	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Tercapainya Keadilan Dalam Penetapan Biaya Retribusi Kebersihan	27 (45%)	31 (51,67%)	2 (3,33%)	60
2.	Menerapkan Kedisiplinan	20 (33,33%)	25 (41,67%)	15 (25%)	60
3.	Keadilan dan Keterbukaan Petugas Pemungutan Retribusi	32 (53,33%)	28 (45,67%)	-	60
4.	Adanya pelayanan yang merata kepada masyarakat yang berbeda.	31 (51,67%)	29 (48,33%)	-	60
Jumlah		110	113	17	240
Rata-rata		27,5	28,25	4,25	60
Persentase (%)		45,84%	47,08%	7,08%	100%

Sumber : Data Hasil Survei 2016

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator pemerataan dikategorikan cukup terlaksana dengan persentase 47,08% dari keseluruhan tanggapan responden masyarakat wajib retribusi kebersihan yang berjumlah 60 orang. Adapun penilaian yang dikategorikan cukup terlaksana adalah 36-65%.

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kerimpulan bahwa masyarakat sudah cukup merasa adil dalam pemungutan retribusi kebersihan karena bagi pemilik usaha dibedakan punggutannya dan berdasarkan tipe rumah

warga itu sendiri, akan tetapi petugas masih kurang dalam memberikan kedisiplinan kepada masyarakat sehingga masih bannyaknya masyarakat yang tidak mau membayar retribusi kebersihan.

4. Responsivitas

Kebijakan yang baik haruslah memenuhi criteria responsivitas, yakni sejauh mana hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka. Jadi, kebijakan harus bersifat responsive terhadap aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan mampu memberikan kepuasan atas

dampak atau manfaat yang diperoleh melalui penerapan kebijakan tersebut.

Tabel 12 :Evaluasi Tanggapan Responden Pegawai dan Petugas Pemungutan Retribusi Kebersihan Terhadap Indikator Responsivitas Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga.

No.	Item yang di Nilai	Kategori Jawaban			Jumlah
		B	CT	KT	
1.	Kepuasan Masyarakat	11 (47,82%)	12 (52,17%)	-	23
2.	Menampung Usulan Masyarakat	17 (73,91%)	6 (26,09%)	-	23
3.	Keluhan Masyarakat	15 (65,22%)	7 (30,43%)	1 (4,35%)	23
4.	Bisa Diterima Masyarakat	7 (30,43%)	11 (47,82%)	5 (21,74%)	23
Jumlah		50	36	6	92
Rata-rata		12,5	9	1,5	23
Persentase (%)		54,34%	39,13%	6,53%	100%

Sumber : Data Hasil Survei 2016

Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru tentang retribusi kebersihan sudah cukup terlaksana karena masyarakat sudah

menerima kebijakan yang telah ditentukan untuk pungutan retribusi kebersihan, dan masyarakat juga jarang sekali ada keluhan terhadap mengenai retribusi kebersihan.

Tabel 13 :Evaluasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Responsivitas Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga.

No.	Item yang di Nilai	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Kepuasan Masyarakat	24 (40%)	26 (43,33%)	10 (16,66%)	60
2.	Menampung Usulan Masyarakat	20 (33,33%)	31 (51,67%)	9 (15%)	60
3.	Keluhan Masyarakat	27 (45%)	22 (36,66%)	11 (18,33%)	60
4.	Bisa Diterima Masyarakat	26 (43,33%)	22 (36,66%)	12 (20%)	60
Jumlah		97	101	42	240
Rata-rata		24,25	25,25	10,5	60
Persentase (%)		40,42%	42,08%	17,5%	100%

Sumber : Data Hasil Survei 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa indicator responsivitas dikategorikan cukup terlaksana dengan persentase 42,08% dari keseluruhan tanggapan responden masyarakat wajib retribusi kebersihan yang berjumlah 60 orang. Adapun penilaian yang dikategorikan cukup terlaksana adalah 36-65%.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai dan petugas dapat menerima keluhan dan masukan dari masyarakat dan masyarakat juga cukup menerima kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah daerah kota Pekanbaru.

5. Ketepatan

Ketepatan yang dirancang dengan tepat, akurat dan memperhatikan segala aspek yang terkait tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terutama bagi kesejahteraan masyarakat dan juga penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. Criteria ketepatan suatu kebijakan maksudnya sejauhmana hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan bermanfaat baik kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PAD dan pelaksanaan pembangunan daerah

Tabel 14 :Evaluasi Tanggapan Responden Pegawai dan Petugas Pemungut Retribusi kebersihan Terhadap Indikator Ketepatan Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga.

No.	Item yang di Nilai	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Konsistensi Prosedur	6 (26,09%)	12 (52,17%)	5 (21,74%)	23
2.	Adanya Waktu Penagihan	8 (34,78%)	11 (47,83%)	4 (17,39%)	23
3.	Karcis Resmi	23 (100%)	-	-	23
4.	Waktu Penyetoran	9 (39,13%)	11 (47,83%)	3 (13,04%)	23
Jumlah		46	34	12	92
Rata-rata		11,5	8.5	3	23
Persentase (%)		50%	36,96%	13,04%	100%

Sumber : Data Hasil Survei 2016

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa indicator ketepatan dikategorikan cukup terlaksana dengan persentase 36,96% dari keseluruhan tanggapan responden pegawai dan petugas pemungut retribusi yang berjumlah 23 orang. Adapun penilaian yang dikategorikan cukup terlaksana adalah 36-65%.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pungutan retribusi kebersihan petugas menggunakan kartu resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, dan waktu pemungutan maupun penyetoran uang retribusi kepada Kelurahan sudah tepat waktu walaupun terkadang ada juga yang telat karena petugas sakit atau ada urusan lainnya.

Tabel 15 :Evaluasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Ketepatan Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga.

No.	Item yang di Nilai	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1.	Konsistensi Prosedur	18 (30%)	31 (51,67%)	11 (18,33%)	60
2.	Adanya Waktu Penagihan	25 (41,67%)	29 (48,33%)	6 (10%)	60
3.	Karcis Resmi	60 (100%)	-	-	60
4.	Waktu Penyetoran	28 (46,67%)	29 (48,33%)	3 (5%)	60
Jumlah		131	89	20	240
Rata-rata		32,75	22,25	5	60
Persentase (%)		54,59%	37,08%	8,33%	100%

Adapun penilaian yang dikategorikan cukup terlaksana adalah 36-65%. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa petugas masih kurang dalam memberikan informasi mengenai

prosedur dalam pemungutan retribusi dan masyarakat ditagih menggunakan kartu resmi tetapi adakalanya petugas jarang menggunakan kartu tersebut dan hanya mencatatnya saja pada buku petugas.

Tabel 16 :Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai dan Petugas Pemungut Retribusi Kebersihan Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

No.	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Efektivitas	12 (52,18%)	8 (34,78%)	3 (13,04%)	23
2.	Kecukupan	7,25 (31,52%)	8,5 (36,96%)	7,25 (31,52%)	23
3.	Perataan	11,25 (48,91%)	9 (39,13%)	2,75 (11,96%)	23
4.	Responsivitas	12,5 (54,35%)	9 (39,13%)	1,5 (6,52%)	23
5	Ketepatan	11,5 (50%)	8,5 (36,96%)	3 (13,04%)	23
Jumlah		54,5	43	17,5	115
Rata-rata		10,9	8,6	3,5	23
Persentase (%)		47,40%	37,39%	15,21%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2016

Dari data tabel rekapitulasi tanggapan responden Pegawai dan petugas pemungut retribusi kebersihan terhadap variable

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, untuk kategori penilaian terlaksana yaitu

sebesar 47,40%, untuk kategori penilaian cukup terlaksana yaitu sebesar 37,39%, dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana yaitu sebesar 15,21%, dari total keseluruhan responden pegawai dan petugas pemungut retribusi kebersihan

sebanyak 23 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan cukup terlaksana dengan total persentase sebesar 37,39%, Adapun penilaian yang dikategorikan cukup terlaksana adalah 36-65%.

Tabel 17 :Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

No.	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Efektivitas	26 (43,33%)	23,75 (39,58%)	10,25 (17,13%)	60
2.	Kecukupan	18,75 (31,25%)	25,5 (42,5%)	15,75 (26,25%)	60
3.	Perataan	27,5 (45,83%)	28,25 (47,09%)	4,25 (7,08%)	60
4.	Responsivitas	24,25 (40,42%)	25,25 (42,08%)	10,5 (17,5%)	60
5	Ketepatan	32,75 (54,59%)	22,25 (37,08%)	5 (8,33%)	60
Jumlah		129,25	125	45,75	300
Rata-rata		25,85	25	9,15	60
Persentase (%)		43,08%	41,67%	15,25%	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2016

Dari data tabel rekapitulasi tanggapan responden masyarakat terhadap variable Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, untuk kategori penilaian terlaksana yaitu sebesar 43,08%, untuk kategori penilaian cukup terlaksana yaitu sebesar 41,67%, dan untuk kategori penilaian kurang terlaksana yaitu sebesar 15,25%, dari total keseluruhan responden masyarakat wajib membayar retribusi kebersihan sebanyak 60 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan cukup terlaksana dengan total persentase sebesar 41,67%, Adapun penilaian yang

dikategorikan cukup terlaksana adalah 36-65%.

Dari data dan penjelasan diatas maka penulis memilih rekapitulasi tanggapan responden dari pegawai dan petugas pemungut retribusi kebersihan, dikarenakan pelaksanaan pemungutan yang baik itu tergantung dari petugas pemungut retribusi kebersihan apakah dapat bersikap baik dan tegas kepada masyarakat yang tidak mau membayar retribusi kebersihan, dan dapat menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan baik, dan dapat disimpulkan bahwa untuk variable pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan

cukup terlaksana karena berdasarkan pendapat dari responden yang diukur dari 5(lima) indikator yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Maka diharapkan Kepala Kelurahan Simpang Tiga maupun petugas pemungut retribusi kebersihan dapat mengoptimalkan lagi sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan pemungutan retribusi ini jauh lebih terlaksana dengan baik khususnya di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Kesimpulan

1. Efektivitas

Pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi kebersihan sudah cukup terlaksana secara efektif walaupun masih adanya kendala dalam penerapan Kebijakan Retribusi kebersihan tersebut seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak mau membayar uang retribusi kebersihan, sehingga Peraturan Daerah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya dapat terlaksana, dimana kebijakan tersebut masih kurang dalam memecahkan masalah yang dihadapi, kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat juga menyebabkan masyarakat tidak mau membayar retribusi kebersihan sehingga target tidak pernah tercapai di Kelurahan Simpang Tiga.

2. Kecukupan

Dalam pelaksanaan Penerapan kebijakan retribusi kebersihan dalam pemungutan retribusi kebersihan petugas memungut retribusi dengan lancar setiap bulannya kepada masyarakat, akan tetapi untuk biaya yang dipungut petugas memungut uang retribusi kebersihan dengan memungut biaya tambahan kepada

masyarakat sehingga belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru.

3. Perataan

Dalam Pemungutan uang retribusi kebersihan petugas cukup menerapkan keadilan dalam menetapkan biaya retribusi kepada masyarakat berdasarkan kelas rumah dan kelas usaha yang dimiliki oleh masyarakat dan petugas juga cukup memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat, untuk kedisiplinan petugas masih kurang dalam mendisiplinkan masyarakat yang tidak mau membayar uang retribusi kebersihan dengan memberikan sanksi kepada masyarakat sehingga masyarakat juga mengulur-ulur waktu dalam membayar uang retribusi kebersihan.

4. Responsivitas

Pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga kepuasan masyarakat cukup terlaksana dengan baik, petugas memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menampung usulan dan keluhan masyarakat dengan harapan dapat mengurangi masyarakat yang tidak mau membayar uang retribusi kebersihan dan peraturan pemerintah mengenai retribusi kebersihan juga cukup diterima oleh masyarakat untuk itu diharapkan kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

5. Ketepatan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga petugas cukup melaksanakan pemungutan dengan tepat waktu setiap bulannya dan menggunakan karcis resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan

Daerah dan pemungutan uang retribusi kebersihan cukup sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Saran

1. Dalam Penyusunan dan penerapan suatu kebijakan hendaknya menampung berbagai aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial-ekonomi, politik, dan sebagainya.
2. Pegawai maupun petugas pemungut retribusi kebersihan hendaknya selalu memberikan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tau tentang kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Kebersihan sehingga masyarakat mengerti bagaimana manfaat dari retribusi kebersihan bagi masyarakat dan apa sanksi yang mereka dapat jika tidak membayar uang retribusi kebersihan.
3. Disarankan agar masyarakat dapat membayar uang retribusi kebersihan tepat waktu.
4. Bagi masyarakat yang tidak mau membayar retribusi kebersihan hendaknya diberikan sanksi yang tegas.
5. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga seharusnya dapat menyediakan truk sampah secara merata di setiap kelurahan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan persampahan dari pemerintah, dan truk sampah dapat mengangkut sampah ke seluruh daerah dikelurahan tersebut sehingga masyarakat tidak lagi membayar biaya tambahan kepada petugas dikarenakan untuk membayar upah truk pemengangkut sampah yang telah

ditunjuk oleh pihak RT atau Rw sendiri.

Daftar Kepustakaan

- Agustiono, Leo, 2014. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Ali, zaini, Al Hafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Brantas., 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta.
- Denur. DJ, 2005, *Dasar Kepemimpinan dan Keorganisasian*, Pekanbaru, UIR Press.
- Dun, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bogor, Gajah Mada.University Press.
- Erwan, Dyah., 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gava Mrdia.
- Haris Budiyono, Amrullah., 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Haris, Syamsuddin, 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta, LIPI Press.
- Hamim, Sufian, Indra Muchlis Adnan, 2005. *Administrsi, Organisasi, dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.
- Hamim, Sufian. 2012. *Manajemen Strategis*. Pekanbaru, UIR Press.
- Ibrahim, Amin, 2004, *pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta (AKP), Bandung Mandar Maju.

- Kaho, Josef Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kusdi., 2011. *Teori Organisasi dan Adminiatrasi*. Jakarta, Salemba Humanika.
- Mardiasmo, MBA.,Ak. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi perss. Yogyakarta.
- Marbun., 2005, *Otonomi Daerah 1945-2005, Proses dan Realita*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Muhammad Bakhrun Efendi. 2006. *Kebijakan Perpajakan Di indonesia*. Alinea Pustaka.Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Gramedia Widarsana.
- Nugroho, Riant D., 2004. *Kebijakan Publik Formulasi*. Jakarta, PT. Elekmedia Komputindo.
- Nogi, Hessel, 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Balairung, Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik*. Makasar, Alfabeta.
- Ratminto, Atik , 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Siagian Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*, edisi refisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siagian, Sondang. P., 2006. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Soebechi, Imam, 2012. *Judical review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono., 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sumaryadi, I. Nyoman, 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta, Citra Utama.
- Suseno, Franz Magnis, 2000. *Kuasa dan Moral, Legimilasi Kekuasaan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Syafii, Inu Kencana., 2003. *Sistam Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman., 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta. Erlangga.
- Winarna., 2002. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Yani, Ahmad., 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Zulkifli., 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen* . Pekanbaru, UIR Pres.

Dokumentasi

- Buku Pedoman Penulisan Edisi Revisi., 2013. Pekanbaru, UIR Press.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2000 Tentang Usaha rumah Makan.
- Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Uddang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang: Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.